

PERANAN SRI SULTAN HB IX PADA TAHUN 1950-1965

Oleh : Suratmin

1. Dalam Bidang Pemerintahan dan Militer

Pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda menyerahkan kembali kedaulatan kepada Republik Indonesia. Penyerahan kembali kedaulatan Republik Indonesia itu di Negara Belanda diwakili Muhammad Hatta, pihak Belanda oleh Rovink, sedang di Jakarta Republik Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Selanjutnya tahun berikutnya pada tanggal 17 Agustus 1950 sesuai dengan keinginan rakyat terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedaulatan telah dapat diraih kembali dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Kepala Daerah Provinsi DIY mulai menata kembali birokrasi pemerintahannya. Akibatnya dari dasyatnya revolusi fisik, maka kesultanan di bawah kekuasaan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alaman di bawah kekuasaan Paku Alam VIII menggabungkan diri dari satu daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penggabungan antara Kesultanan dan Paku Alaman ini semakin mantap. Di dalam negara kesatuan ini Sri Sultan Hamengku Buwono IX di samping sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjabat Menteri Pertahanan. Waktu menjadi Menteri tanggungjawabnya semakin berat. Lebih-lebih setelah Pemerintah Pusat kembali ke Jakarta.

Kalau dilihat sepintas saja keadaan yang demikian itu namanya aneh, karena menjadi raja tapi meninggalkan istana. Apakah hal yang demikian itu tidak bertentangan dengan naluri, dan tidak menyimpang dari ketentuan raja-raja ?

Hal ini pernah menjadi pemikiran Sultan, tetapi akhir pendapatnya atau hatinya di mana saja asal dirinya dapat menyumbangkan tenaga, pikirannya untuk keperluan negara dan bangsa, semua itu dianggap bukan apa-apa.

Mengenai dirinya tinggal di Yogyakarta atau di Jakarta sama saja. Walau Sri Sultan tinggal di Jakarta, tetapi kadang-kadang juga datang ke Yogyakarta, pulang ke kraton. Mestinya perlu menenangkan dirinya mengumpulkan tenaga lagi perlu untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak ringan tersebut. Bila Sultan berada di Jakarta, yang menjalankan tugas pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta ialah wakilnya sebagai Kepala Daerah yaitu Kanjeng Gusti Paku Alam VIII, sedang wakil keluarga Pangeran Poeroenojo.

Sejak awal revolusi, Sultan selain dekat dan dipercaya oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam rapat pertama pengorganisasian tentara, Sri Sultan terpilih sebagai Menteri Pertahanan. Waktu menjadi Menteri Pertahanan hubungan Sri Sultan dengan kalangan militer erat sekali. Penunjukannya sebagai menteri pertahanan makin mempererat hubungannya dengan tentara dan masalah-masalah militer Indonesia.

Pada waktu Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjadi Menteri Pertahanan ada suatu insiden yang makin mempererat dirinya sebagai seorang republiken. Itulah yang dikenal sebagai peristiwa yang berkaitan dengan Sultan Hamid II, teman baik Sri Sultan Hamengku Buwono IX, sejak mereka bersekolah rendah sampai kuliah di negeri Belanda. Tetapi pada masa-masa kemudian terjadilah perpisahan antara kedua sahabat karib tersebut. Sultan menjadi seorang pejuang untuk kemerdekaan Indonesia, sedangkan Sultan Hamid II selalu pro Belanda.

Pada tahun 1949 ketika kabinet Republik Indonesia Serikat di bawah Bung Hatta terbentuk, dengan Sri Sultan sebagai Menteri Pertahanan, Belanda sangat kecewa, lantaran orang yang dijagokannya kuat kedudukannya itu tidak lain Sultan Hamid II tetapi tidak terpilih. Rencana mereka apabila Sultan Hamid II yang menjadi Menteri Pertahanan, KNIL akan menjadi inti dari tentara Indonesia dan bukan sebaliknya.

Dengan kekecewaan itu Belanda merencanakan suatu kamp militer yang akan membunuh dan menawan beberapa tokoh terkemuka dalam Kabinet Hatta termasuk Sri Sultan, tetapi rencana ini bocor. Sri Sultan sendiri sebagai Menteri Pertahanan ikut secara aktif dalam membongkar komplotan itu, dan sekaligus menahan Sultan Hamid II sahabatnya yang menjadi tokoh sentralnya.

Sri Sultan juga mempunyai saham besar dalam mencari penyelesaian teknis dan administratif pengintegrasian bekas KNIL (orang-orang Indonesia yang menjadi tentara Belanda) ke dalam TNI. Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dengan Belanda antara lain mensyaratkan agar KNIL dimasukkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (RIS). Padahal bekas KNIL ini umumnya masih memusuhi republik. Sri Sultan sebagai Menteri Pertahanan dan A.H. Nasution sebagai pimpinan tentara menghadapi persoalan yang sangat pelit itu.

Dalam mencari jalan keluar dari kepelikan itu timbul lagi beberapa kesulitan. Masalah utama agar kelangsungan republik dapat terjamin, adalah mengusahakan agar di setiap wilayah pimpinan tentara tidak jatuh kepada bekas KNIL, tetapi ke perwira-perwira TNI. Hal yang kedua adalah mengusahakan agar tokoh-tokoh TNI ini bisa diterima di setiap wilayah. Selain dari kedua masalah di muka di beberapa daerah masih ada 85.000 tentara Belanda yang menunggu dikembalikannya ke negerinya setelah penyerahan kedaulatan.

Untuk maksud ini Jenderal A.H. Nasution bersama dengan Sri Sultan pada tahun 1950 mengadakan perjalanan keliling di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Nasution berkat keahlian Sri Sultan berdiplomasi itulah keduanya berhasil menempatkan orang-orang pusat di setiap pucuk pimpinan tentara di daerah. Dalam perjalanan keliling itu Nasution juga menyaksikan bagaimana Sri Sultan telah menjelma sebagai tokoh nasional yang dicintai rakyat. Di tengah-tengah yang didatanginya ia disambut oleh masyarakat yang mengelu-elukan.

Peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX juga dapat kita saksikan dengan upaya agar Belanda segera ditarik mundur dari Yogyakarta. Pada tanggal 24 Juni 1949 pagi Sri Sultan,

Sri Paku alam VIII, Honggowongso, Wedono Sumardjan dan orang-orang dari UNCI naik kapat terbang ke Gading Gunung Kidul.

Sebagai Menteri Pertahanan tugas Sri Sultan sungguh berat. Di samping harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara, ia juga harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menimpa diri sendiri, sehingga harus dihadapi dengan sikap tegas dan bijaksana. Sri Sultan adalah sebagai patriot bangsa kita terus berjuang untuk negara dan bangsa bersama pimpinan-pimpinan yang lain, giat melakukan kegiatan mengisi kemerdekaan yang telah kita capai dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjabat Menteri Pertahanan sampai tahun 1952. Setelah peristiwa 17 Oktober 1952, ia mengundurkan diri dari kedudukan itu. Peristiwa Oktober itu disebabkan oleh ketidakpuasan beberapa kalangan militer terhadap sikap Bung Karno dalam Program reorganisasi tentara.

Tentara sangat tidak puas atas dukungan BUNG karno kepada Kolonel Bambang Supeno yang menentang reorganisasi. Kabar lain malah Bung karno menyetujui pengangkatan Bambang Supeno sebagai pengganti Kol. A.H. Nasution untuk Kepala staf Angkatan Darat. Yang membuat Nasution tidak enak, Bung Karno mengatakan itu langsung kepada Bambang Supeno. Terjadilah perbedaan pendapat antara Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX dan Kepala Staf Angkatan Perang A.H. Nasution di satu pihak dan Bung Karno di pihak lain. Nasution dengan disokong oleh Hamengku Buwono IX berpendapat bahwa presiden harus membicarakan penggantian seorang pejabat militernya dengan kepala Staf Angkatan Perang dan bukan dengan bawahan si kepala staf tersebut.

Sebagai akibat dari pembicaraan yang panas itu terjadilah peristiwa 17 Oktober 1952 yang pada dasarnya merupakan reaksi emosional tentara atas perlakuan politisi sipil kemudian menimbulkan isubahwan peristiwa itu merupakan suatu usaha kudeta. Sri Sultan membisikkan kepada Bung Karno bahwa apa yang dilakukakan oleh tentara bukanlah suatu kudeta, melainkan suatu ungkapan protes saja. Dalam hal ini Sri Sultan sendiri dianggap sebagai salah satu anggota "Kelompok 17 Oktober", padahal mereka yang terlibat dalam insiden ini tidak pernah membuat organisasi atau mengelompokkan diri. Oleh karena itu Sri Sultan mengundurkan diri. Sejak itu Sri Sultan seolah-olah tenggelam dalam kanca politik Indonesia.

Sejak tidak memegang jabatan apapun di lingkungan pemerintah pusat, maka Sri Sultan kembali ke Yogyakarta. Kedatangannya disambut dengan gembira, karena Sri Suanakan aktif kembali memegang jabatannya sebagai kepala daerah. Walaupun Sri Sultan tidak ikut lagi dalam kabinet, tidak berarti ada ketakserasian hubungan antara Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan Bung Karno. Ruslan Abdulgani mengatakan, walaupun Sri Sultan tidak setuju dengan kebijaksanaan yang ditempuh Soekarno mulai pertengahan 1950-an, keduanya masih saling menghormati pendirian masing-masing dan masih saling berhubungan.

Cak Ruslan memuji sifat Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Kalau Sri Sultan tidak setuju dengan pemikiran seseorang ia akan mengatakan secara terbuka, tetapi sopan. Namun

pertentangan pendapat itu tidak mempengaruhi hubungan pribadi antara Sultan dengan orang tersebut. Ruslan mengambil contoh ketika Sultan ditawari Bung Karno untuk mengetuai Dewan Nasional, ia menolak tawaran itu dengan halus sambil mengatakan: "Tempat itu saya bukan di situ". Akhirnya Dewan Nasional itu terbentuk juga dan diketuai oleh Ruslan.

Selama tak hadir dalam kegiatan politik, Sultan sering datang ke rumah Ruslan untuk memberikannya kesan-kesan politik yang minta disampaikan kepada Soekarno. Ruslan yang mengatakan kesan-kesannya kepada surat kabar berbahasa Inggris *The Jakarta Post* mengenang dan menghormati kejujuran dan sportifitas Sri Sultan. Bagi Sri Sultan Hamengku Buwono IX persaingan politik berarti demi mempertahankan kebenaran, bukan sekedar membaca situasi.

Setelah tahun 1950 negara kita menganut demokrasi parlementer, kemudian demokrasi terpimpin, sedangkan partai-partai digolongkan dalam Nasakom. Dengan Nasakom ini menempatkan kekuasaan Presiden Soekarno pada tempat yang tinggi. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada tahun 1948 telah berkhianat mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dengan tujuan mendirikan negara komunis di Indonesia. Pemberontakan itu telah banyak membawa korban. Untung dalam waktu relatif cepat mereka segera ditumpas.

2. Dalam Bidang Sosial Ekonomi

Sri Sultan Hamengku Buwono IX sejak awal berfikir dan berbuat untuk mengurangi penderitaan rakyat, kalau tidak dapat menaikkan kesejahteraan mereka. Usaha Sri Sultan untuk menaikkan kesejahteraan rakyatnya telah ditempuh dengan berbagai cara, antara lain melalui pertanian dan perkebunan.

Oleh sebab itu dengan pengakuan kedaulatan oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949, maka berangsur-angsur jalannya roda pemerintahan ditata. Sejalan dengan penataan itu, maka pada tahun 1954 Sri Sultan mendirikan sebuah organisasi tani yang diberi nama Yayasan Kredit Tani (Yakti). Organisasi ini berusaha dalam bidang penanaman tembakau Virginia dan berfungsi sebagai penyalur kredit bagi petani-petani. Pada tahun berikutnya Yakti bermaksud memperluas usahanya untuk menanam tebu dan mendirikan pabrik gula. Namun disayangkan, belum genap satu tahun organisasi tersebut terpaksa dibubarkan. Pembubaran ini disebabkan oleh adanya penyelewengan-penyelewengan dalam tubuh organisasi, khususnya yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Walaupun kenyataannya Yakti telah dibubarkan, Sri Sultan HB IX tetap menghendaki usaha penanaman tebu dan mendirikan pabrik gula tetap terus berjalan. Dengan dibangunnya pabrik gula baru itu dimaksudkan mengganti sebagian dari 17 pabrik gula Belanda yang telah hancur pada waktu Agresi Belanda II. Adapun maksud Sri Sultan yang lain adalah dengan dibangunnya pabrik gula baru dapat diharapkan menampung ribuan buruh gula non aktif, buruh tani dan orang-orang yang memerlukan pekerjaan.

Ketika rencana itu oleh Panitia Pendiri Pabrik Gula (PPPG) disampaikan kepada DPR Daerah Istimewa Yogyakarta, partai-partai politik mulai memperdebatkan soal tempat dimana pabrik gula akan dibangun. Masing-masing partai menghendaki agar pabrik gula baru nanti dibangun di daerah yang banyak pengikutnya. Pertentangan antara partai semakin hari semakin serius, sehingga kemungkinan dapat mengancam rencana pembangunannya. Namun semuanya dapat teratasi setelah Sri Sultan Hamengku Buwono IX memutuskan bahwa penanganan dan pengawasan langsung di bawah wewenang pemerintah pusat. Kemudian untuk lokasinya diusahakan bekas Pabrik gula padokan dan bekas Pabrik Gula Gesikan, dengan berbagai macam pertimbangan. Akhirnya oleh Sri Sultan ditentukan bahwa pendirian pabrik gula baru itu dibangun di bekas Pabrik Gula Padokan atas Padokan atas Pertimbangan praktis dengan nama “Pabrik Gula Madukismo”.

Berhubung pada waktu itu sulit mendapatkan kredit lunak dari luar negeri dan hanya Republik Jerman Timur satu-satunya negara yang bersedia memberikan pinjaman, maka pada tahun 1955 pemerintah membeli mesin pabrik dari negara tersebut.

Pembangunan Pabrik Gula Madukismo yang dibiayai dengan dana pemerintah pusat sebesar 200 juta rupiah. Akhirnya dapat diselesaikan pada 31 Maret 1958 secara resmi dibuka oleh presiden Soekarno. Sebelum presiden Soekarno menyampaikan pidato peresmian, terlebih dahulu Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Presiden Direktur Pabrik Gula Madukismo Baru di dalam pidato pembukaannya menerangkan :

“... bahwa biaya pendirian pabrik tersebut dipinjam dari pemerintah Pusat. Bila uang pinjaman itu nanti dikembalikan lalu dipinjamkan lagi kepada pemerintah daerah untuk mendirikan perusahaan-perusahaan lain yang penting. Dengan demikian modal itu merupakan modal pokok untuk membangun industri di daerah Yogyakarta.”

Untuk selanjutnya Sri Sultan menyampaikan terima kasihnya kepada ahli teknik dari Jerman Timur yang telah memberikan pekerjaan pendirian Pabrik Gula Madukismo. Di samping itu usaha Sri Sultan selanjutnya mencari modal kepada pemerintah pusat. Untuk mengadakan Pekan Raya Kerajinan Nasional (PRKN) yang akan diadakan di Yogyakarta. Dana yang diperlukan 500 ribu rupiah, antara lain untuk sewa tanah. Adapun maksud diadakannya Pekan Raya itu untuk mendorong perkembangan kerajinan dan industri rakyat dengan bahan-bahan yang ada dan terdapat di dalam negeri. Selain itu Pekan Raya itu diadakan untuk memperingati dua windu atau 16 tahun kemerdekaan RI. Rencana pelaksanaan Pekan Raya itu 45 hari, yaitu mulai dari 29 Juni 1961 sampai 17 Agustus 1961.

Selain masalah-masalah ekonomi, masalah sosial pun tak luput dari perhatian Sri Sultan. Pada 11 Februari 1954 Sri Sultan berpendapat, di samping sumbangan uang, pakaian dan barang-barang lainnya keperluan sehari-hari untuk para korban merapi yang diberikan oleh rakyat pada umumnya, ada yang lebih penting lagi yaitu adanya bantuan darah. Dengan adanya bantuan darah itu besar kemungkinan para korban yang mendapat luka-luka dan kekurangan darah dapat segera tertolong, untuk itu diperlukan donor sebanyak-banyaknya. Dalam kesempatan ini Sri Sultan sanggup menyumbangkan darahnya, tentu dengan pemeriksaan dokter.

3. Dalam Bidang Agama

Walaupun Sri Sultan HB IX adalah seorang muslim dan bergelar khalifatullah dan *Panetep Panatagama*, beliau tidak membeda-bedakan agama di dalam pergaulan masyarakat. Semua umat beragama diterima dan mendapat perhatian yang sama dari tokoh yang sangat bijaksana itu.

Menurut H. Mu'in Umar, Sultan sangat berjasa dalam masyarakat syiar islam khususnya di Yogyakarta dan sekitarnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kelangsungan tradisi sekaten, yang pada prinsipnya merupakan sarana dakwah Islam sejak zaman Sunan Kalijaga. Selain itu manifestasi gelar sultan sebagai *Panetep Panatagama*, antara lain dengan mengangkat penghulu keraton, mendirikan Masjid Sulthoni di empat penjuru wilayah Yogyakarta serta menempatkan takmir masjid yang masih termasuk kerabat keraton.

Namun demikian, Sri Sultan tetap memberikan tempat yang leluasa bagi perkembangan agama-agama lain. Sebagai seorang raja yang bijaksana, beliau tidak pernah membeda-bedakan agama dalam pergaulan. Atas sikapnya yang demikian itu, menjadikan Sultan figur pujaan umat beragama.

Menurut Simuh, gelar *Panetep Panatagama* dan *Khalifatullah* memang dengan konteks Islam. Dengan gelar tersebut, Sri Sultan berusaha mengembangkan Islam di wilayahnya. Namun demikian, selaku seorang raja yang bijaksana ia merangkul pula pemeluk-pemeluk agama lain. Memang demikian semetinya pemeluk agama yang baik. Dalam Islam toleransi terhadap agama lain juga diajarkan. Dan ternyata Sri Sultan mampu menerapkannya dengan baik, sehingga seluruh umat beragama merasa mendapat perhatian dari beliau.

Menurut Romo Sandiwanbroto, Sri Sultan merupakan sosok pemimpin yang tidak membeda-bedakan agama. Walaupun Sri Sultan mendapat julukan panetep Panatagama, dan beragama Islam, namun agama-agama lain mendapat kesempatan dan perhatian yang sama. "Kita tak pernah mendapat rintangan menjalankan ibadah". Demikian pula dalam tempat-tempat pembangunan peribadatan berupa kapel maupun gereja-gereja selalu tidak mendapat rintangan.

4. Peranan Sri Sultan HB IX Dalam Kepramukaan

Keberadaan Sri Sultan memang seakan-akan menyusup di segala macam kegiatan masyarakat. Tidak hanya dalam bidang politik dan olahraga, akan tetapi juga dalam gerakan Pramuka. Dalam bidaang ini peranan Sri Sultan sebagai peletak tonggak-tonggak penting di sepanjang sejarah kepramukaan di Indonesia sangat besar. Tonggak-tonggak sejarah tersebut ialah semangat demokrasi, pengindonesiaan kepaduan yang disesuaikan dengan nafas bangsa Indonesia.

Pada diri Sri Sultan membekas dalam kegiatan kepramukaan. Pada tahun 1945 pemerintah mencoba mengadakan fusi atas berbagai organisasi kepanduan. Organisasi-organisasi itu biasanya terpisah-pisah dan berada di bawah *onderbow* partai politik.

Pernyataan ini diusahakan di bawah Pandu Rakyat Indonesia. “Waktu itu Sri Sultan belum aktif dalam kepanduan”, kata Mayjen (Purn) Azis Saleh, yang juga bekas Ketua Harian Kwartir Nasional Pramuka.

Sebelum penyerahan kedaulatan 1949, di daerah yang dikuasai RI hanya ada satu organisasi kepanduan tetapi waktu RIS terbentuk organisasi kepanduan Indonesia kembali terpecah-pecah. Kalau dihitung ada 104 organisasi”, kata Azis Saleh. Karena itulah lalu muncul gagasan untuk federasi. Sebagai hasilnya, pada tahun 1950-an terciptalah organisasi pandu putra dan pandu putri, Sri Sultan Hamengku Buwono IX kemudian menjabat sebagai ketua federasi pandu putra yang diberi nama IPINDO (Ikatan Pandu Putra Indonesia). Walaupun demikian kondisi pandu masing-masing terpecah-pecah menteri P dan K Bahder Djohan sulit menentukan pembiyaannya.

Pada masa pemerintahan Kabinet Kerja I, 19 Juli 1949 - 18 Februari 1960, Bung Karno memerintahkan Menteri P dan K Prijono yang beraliran kiri, untuk mempersatukan organisasi kepanduan Indonesia. Untuk itu pada tahun 1960 diadakan suatu rapat di Ciloto, Sri Sultan yang pada waktu itu juga menjadi Ketua Pengawas Kegiatan Aparatur Negara turut hadir. Rapat itu gagal mempersatukan kegiatan kepanduan, sehingga Bung Karno turun tangan dengan memberi intruksi kepada Prijono

Azis Saleh curiga dengan langkah Prijono yang bermaksud memberi nama Pionir Muda yang berbau komunis kepada kepanduan Indonesia. Menteri kiri ini juga mencoba mengubah warna kaku (dari pandu) dengan warna merah. Azis kemudian membocorkan rencana Prijono kepada federasi kepanduan. “Kalau itu jadi habslah riwayat kepanduan di Indonesia,” kata Azis Saleh kepada mereka.

Azis Saleh mengajukan federasi-federasi itu menjadi satu saja. Maksudnya, supaya dapat mencegah terealisirnya rancangan Prijono tersebut. Pokoknya harus dicari jalan agar Presiden Soekarno tidak mendekritkan rencana Prijono. Dalam suatu rapat IPINDO yang dipimpin Sri Sultan, Azis Saleh kemudian mengusulkan agar kepanduan di Indonesia disesuaikan dengan kepanduan yang sudah merdeka. Usul ini didukung oleh Sri Sultan.

Azis Saleh diberi tugas oleh federasi kepanduan untuk membuat rencana yang kemudian diajukan dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh Ir. Djuanda. Pada siang itu pula diajukan yang dibuat oleh Prijoni. Menurut Azis Saleh, sedang menempatkan acara tentang kepanduan itu sebagai yang terakhir, sehingga akhirnya sidang menundanya. Ini memang sengaja agar memberi kesempatan berbagai organisasi kepanduan untuk melebur menjadi satu organisasi saja.

Kemudian Azis Saleh berhasil duduk di dalam suatu tim untuk mengadakan organisasi kepanduan bersama dengan Prijono. Menteri Achmadi dan Sri Sultan sendiri atas usul Azis Saleh menyetujui untuk mengangkat Sri Sultan menjadi ketua tim dan dia sendiri menjadi sekretarisnya. Sultan lalu menyuruh Azis Saleh menyusun sebuah rancangan anggaran dasar kepanduan, tetapi diam-diam Prijono mengajukan rancangan yang telah

dibuatnya kepada Bung Karno dan kemudian ditandatangani oleh Bung Karno karena mengira kertas kerja itu disusun oleh tim.

Untungnya rencana Prijono itu belum sempat diumumkan dan masih di tangan Menteri Sekretaris Kabinet Muhammad Ichsan. Azis Saleh yang baru datang dari Surabaya buru-buru menemui Bung Karno dan menerangkan duduk perkaranya. Akhirnya, Bung Karno membatalkan tanda tangannya, sehingga rencana Prijono itupun batal.

Selagi Prijono ikut perjalanan presiden ke luar negeri, tim sultan tanpa Prijono berhasil menyelesaikan sebuah rencana. Inilah yang kemudian ditandatangani oleh Ir. Djuanda sebagai Pejabat Presiden selama Bung Karno tidak ada di tempat.

Setelah kembali, Prijono protes. Sultan kemudian dipanggil Bung Karno ke Istana Bogor. Ternyata Prijono sudah ada di sana. Prijono menghendaki agar janji kepada negara didahulukan dari berjanji kepada Tuhan, seperti yang tercantum dalam Pramuka. Akhirnya Bung Karno mengambil jalan tengah agar anggaran dasar itu dicoba terlebih dahulu. Sewaktu pulang ke Jakarta, di dalam mobil sultan mengatakan anggaran dasar dan janji Pramuka ini tak akan diubah. Sultan pun tidak setuju dengan konsep Pionir Muda-nya Prijono yang berbau komunis.

Dalam anggaran dasar yang ditandatangani Djuanda itu, kata “Pandu” diganti dengan “Pramuka”, semacam pasukan yang berdiri paling depan dalam peperangan. Jadi tidak benar anggapan kata itu diperkenalkan oleh Menteri Prijono yang memperkenalkan istilah Pionir Muda. Istilah Pramuka diperkenalkan sultan dalam rapat di Ciloto.

Lalu, kata “Pramuka” sama dengan Pionir Muda, sebutan ini diakali seolah-olah merupakan *Praja Muda Karana* yang artinya warga negara muda yang bekerja. Istilah ini didapat dari seorang mahasiswi Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang menjadi salah satu pemimpin kepanduan di Indonesia. Nama si mahasiswi itu tidak lain adalah Soemartini yang kemudian menjadi Direktur Arsip Nasional.

Sehari-hari di luar kraton ia lebih sennag bila kenalan-kenalannya memanggil dirinya dengan sebutan “Pak Sultan”. Sri Sultan sejak tahun 1960 menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka yang dipanggil “Kak Sultan”. Bahkan, di awal revolusi ia dipanggil “Bung Sultan”, seperti halnya Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan Bung Tomo. Ketika itu “bung” (sobat) merupakan panggilan akrab, bahkan terkesan lebih keren dan revolusioner.

Di hari tuanya sultan tetap aktif dalam kegiatan kepramukaan. Ia tak segan-segan mengantar pulang anak-anak. Pada suatu hari Kak Sultan berkeliling lewat gang-gang di Yogyakarta, ketika itu ada-ada saja anak Pramuka yang “nakal”. Dengan menghadang jip Kak Sultan, mereka meneriakkan Salam Pramuka. Sri Sultan menginjak rem dan membalas salam sambil melempar senyumnya yang kebabakan. Maka dengan perasaan bangga, anak-anak itu diantar oleh *Ngarsa Dalem* sampai ke rumah masing-masing.

Keberadaan Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah sebagai peletak tonggak-tonggak penting. Jasa Sri Sultan benar-benar membekas dalam kegiatan kepramukaan. Pada tahun 1945 pemerintah berusaha mengadakan fusi atas berbagai organisasi kepanduan. Organisasi-organisasi itu biasanya terpisah-pisah dan berada di bawah *onderbouw* partai politik. Penyatuan ini diusahakan di bawah Pandu Rakyat Indonesia. “Waktu itu Sri Sultan belum aktif dalam kepanduan”, kata Mayjen (Purn.) Azis Saleh yang juga bekas Ketua Harian Kwartir Nasional Pramuka.

Jabatan Sri Sultan sebagai Ketua Kwartir Gerakan Pramuka yang diemban sejak tahun 1968 merupakan tugas Sri Sultan setelah berhasil menggabungkan sekitar 70 organisasi kepanduan yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Jabatan ini diembannya sampai tahun 1974 atau setelah mengabdikan dirinya selama 15 tahun. Dalam rentang waktu tersebut maka tonggak yang ditancapkan seperti telah disebutkan di atas pada intinya yaitu berusaha untuk mempopulerkan gerakan pramuka di tingkat nasional maupun internasional.

Di tingkat nasional karena peranan dalam bidang kepramukaan ini, maka pada tahun 1974 memperoleh penghargaan dari Presiden Soeharto sebagai Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka diangkat menjadi Pembina Pramuka Ahli bersama dengan Azis Saleh dan H. Muttahar. Demikian juga pada tahun 1984 mendapat anugerah Lencana Tunas Kencana oleh Presiden Soeharto. Di tingkat internasional Sri Sultan juga pernah memperoleh penghargaan tertinggi dalam dunia kepramukaan yaitu dengan *Bronze Wolf Award* dan *Boy Scout of Amerika*. Di samping itu, Sri Sultan juga ikut berperan dalam organisasi kepanduan dunia yang disebut dengan nama *Wolf Organization of Scout Movement* yang diketuai oleh raja Swedia.

Usaha-usaha Sri Sultan untuk memberikan nilai-nilai lebih terhadap gerakan Pramuka ialah dengan mengaktifkan nafas gerakan Pramuka. Pramuka bukanlah sekedar sarana untuk bermain-main, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk memperoleh ketangkasan, pembentukan watak, dan kekuatan fisik. Di dalam kegiatan Pramuka juga seharusnya terbina sikap bakti terhadap orang tua, bangsa, dan negara. Bakti tersebut harus terwujud nyata dan hal ini direalisasikan dalam bentuk *Committe Development Project* di daerah Cibeureum, Jawa Barat. Di tempat ini anak didik untuk memiliki keterampilan yang akan dibaktikan kepada masyarakat. Gagasan ini jelas merupakan usaha untuk mendinamisasikan gerakan Pramuka agar sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Sumber : Suratmin dan Daliso Rudianto, *Sri Sultan Hamengku Buwono IX : Pejuang dan Pelestari Budaya*, Pustaka Kaiswaran : 2012.